

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 2001. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan menggambarkan serta memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termaksud daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, (Bastian 2006). Adapun misi utama undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan, Oleh karena itulah diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian 2006:6). Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonomi yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah. Analisa prestasi dalam hal ini adalah kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk

memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya disesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi.

Kuangan Negara, yang telah membuat perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemudian saat ini keluar peraturan tentang Pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Pemerintah RI No 58 tahun 2004 dan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menggantikan Kepmendagri No. 29 tahun 2002. Dalam reformasi anggaran tersebut, proses penyusunan APBD diharapkan menjadi lebih partisipasi. Hal tersebut sesuai dengan permendagri No.13 tahun 2006 yaitu dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada rencana strategi daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah.

Selain itu sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran pada efektivitas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat. Undang-undang No.17 tahun 2003 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan Laporan Realisasi Anggaran yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja Anggaran pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Melalui permendagri No. 13 tahun 2006 implementasi pradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota (PEMKOT) Surabaya merupakan salah satu Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Timur yang diharuskan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan laporan realisasi anggaran pada pelaporan keuangan tersebut berpedoman pada ketentuan pokok yang menyangkut pengelolaan keuangan dan otonomi daerah serta peraturan pelaksanaannya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam penerapannya diperkuat oleh peraturan daerah.

Skripsi ini akan membahas mengenai Analisa Kinerja Keuangan Daerah pada pelaksanaan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran. Dari data yang diperoleh dari BPKPD kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis memberi judul :

“ Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Anggaran Berbasis Incremental Budgeting Terhadap Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemerintahan Kota Surabaya “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Apakah penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya?
2. Apakah Penganggaran Incremental Budgeting berpengaruh terhadap efektivitas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan Penerapan Anggaran Berbasis Incremental Budgeting terhadap Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus kepada :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi pemerintahan, khususnya bagaimana penerapan penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran berbasis incremental budgeting berpengaruh terhadap Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Surabaya.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai informasi tambahan referensi dalam menganalisis Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah setelah diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.
3. Bagi Akademisi, sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada pengembangan akuntansi sektor public.